BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas hubungan antara kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan migrasi masuk terhadap tingkat kriminalitas untuk memberikan pemahaman yang dalam mengenai isu sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi landasan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pembangunan ekonomi terdapat permasalahan yang sering terjadi di setiap negara terutama Indonesia. Permasalahan utama adalah lapangan pekerjaan yang tidak memadai ketika dibandingkan dengan angka penduduk yang ada. Dampaknya adalah terjadi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan (Azmi et al., 2024).

Kriminalitas atau tindakan pidana merupakan suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dimana harus diadakan penghukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan (Audey & Ariusni, 2019).

Kejahatan merupakan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Tentu saja, perbuatan jahat itu tidak baik atau merugikan. Hal tersebut terjadi karena tindakan itu berisiko dan bisa merugikan banyak orang, serta orang yang melakukan kejahatan disebut sebagai criminal atau penjahat. Kejahatan adalah kata yang

memiliki makna negatif di masyarakat, karena orang-orang sering memiliki pandangan buruk ketika mendengar kata tersebut. Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh wanita maupun pria. Tindak kejahatan bisa dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan berpikir, merencanakan, dan mengarahkan ke tujuan tertentu secara sadar. Kejahatan juga bisa terjadi tanpa disadari sama sekali, misalnya karena seseorang terpaksa bertahan hidup, maka ia harus melawan dan akhirnya terpaksa menyerang orang lain, sehingga terjadi kasus pembunuhan. Kriminalitas atau tindakan kejahatan kadang-kadang terjadi karena kondisi ekonomi yang buruk. Banyak kerugian yang terjadi karena tindak pidana, seperti kerugian materi, kerugian fisik, kerugian batin, dan kerugian mental. Dari sudut pandang ekonomi, kejahatan mengakibatkan kerugian dengan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi tindakan kriminal tersebut. Biaya ini tidak hanya dibebankan kepada korban, tetapi juga dibagi oleh masyarakat, komunitas bisnis, serta pemerintah daerah dan lokal. (Sullivan, 2019).

Kriminalitas adalah tindakan besar yang selalu terjadi di setiap negara baik di negara maju maupun berkembang dan sulit dihindari. Indonesia menjadi bagian dari negara berkembang dengan tingkat kriminalitas jika dibandingkan dengan Amerika Selatan, Irak, dan Kolumbia berada pada posisi 3 besar dengan tingkat tertinggi di dunia. Meskipun tingkat kriminalitas di Indonesia berada pada posisi sedang di dunia tetap tidak bisa dipungkiri itu sangat merugikan. Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan ketidak keselarasan dalam kehidupan dengan tidak sesuainya aturan dan norma (Sari & Azhar, 2019).

Kriminalitas adalah tindakan yang sering terjadi di berbagai dunia. Tindak kriminalitas dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang individu ataupun kelompok terhadap masyarakat (Ramadhani et al., 2024). Dampak yang diberikan berdasarkan tindak kejahatan atau kriminalitas memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan terdapat penyebab dari terjadinya individu ataupun kelompok dalam melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas (Kasim & Hendra, 2023). Penyebab terjadinya tindak kriminalitas dapat didasari oleh faktor biologis, sosiologis dan ekonomi. Permasalahan kemiskinan termasuk dalam faktor-faktor sosiologis dan ekonomi (Septriani et al., 2024)

Kriminalitas dan kemiskinan adalah dua masalah sosial yang sampai sekarang masih sulit dipecahkan dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan. Manusia akan menghalalkan segala cara ketika kondisi keuangannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab itu kemiskinan bisa memberikan dampak besar terhadap terjadinya kriminalitas.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2023 terjadi kenaikan kriminalitas yang siginifikan. Ada peningkatan angka yang sangat tinggi di daerah Maluku Utara pada tahun 2020 dan Kalimantan Utara pada tahun 2021, di mana grafik menunjukkan angka indeks pelaporan hampir mencapai batas tertinggi 1.000. Sementara itu, pada tahun 2023, tren kenaikan kriminalitas terjadi secara merata di hampir semua provinsi di Indonesia, terlihat dari dominasi batang warna ungu yang posisinya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

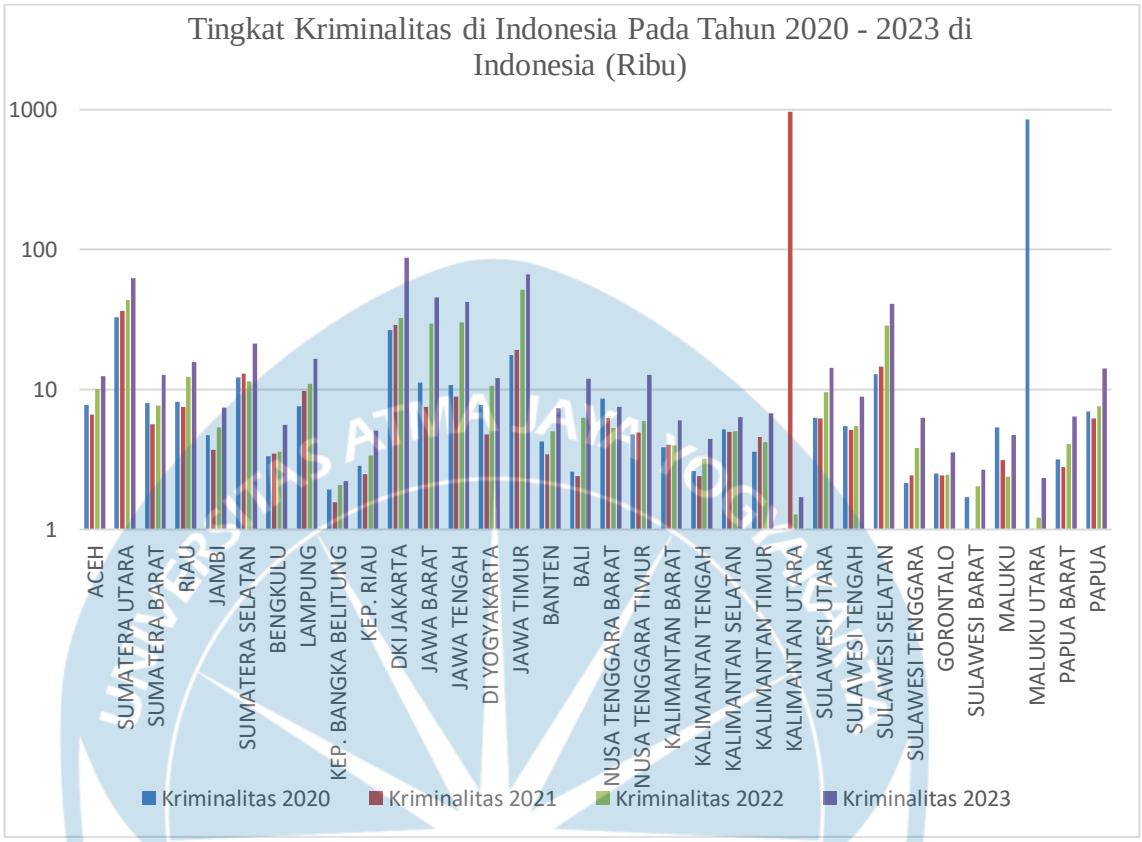
Pada tahun 2020 terdapat kasus sebanyak 247.218 kasus yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat kasus sebanyak 239.481. Pada tahun 2022

terdapat kasus sebanyak 372.965 dan pada tahun 2023 terdapat kasus sebanyak 584.991.

Kenaikan angka kriminalitas pada empat tahun terakhir terbilang tinggi tetapi jika dibandingkan antara empat tahun tersebut kenaikan pada tahun 2022-2023 adalah yang terbesar dengan angka kenaikan sebanyak 212.026 kasus yang terjadi dalam setahun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020-2021 sebesar 7.737. Angka-angka tersebut diperoleh dari 37 provinsi yang ada di Indonesia.

Data tersebut menjelaskan tingginya angka tindak kriminalitas di Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara yang telah mencapai angka 850 - 971 kasus tindak kriminalitas menurut kepolisian daerah. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa pada 2023 terjadi peningkatan angka kriminalitas yang sangat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya angka-angka tersebut diduga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan migrasi masuk di Indonesia.

Berdasarkan analisis data tahun tentang penduduk miskin pada tahun 2020-2023 nilai tertinggi penduduk miskin berada pada nilai 26,8%, 21,82%, 20,44% dan 15,53% nilai tersebut berada pada tahun 2021 yaitu pada kota Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Aceh serta menjadi angka tertinggi dalam empat tahun terakhir



Gambar 1. 1
Grafik Kriminalitas di Indonesia Tahun 2020 - 2023

Sumber : Statistik Kriminal (2020 - 2023)

Pada tahun-tahun tersebut penduduk miskin mengalami penurunan secara progresif sehingga pada tahun 2021 nilai tertinggi penduduk miskin berada pada nilai 27,38% yaitu pada kota Papua.

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan tidak tersebar secara merata juga menjadi salah satu faktor terlahirnya konflik. Mantra (Audey & Ariusni, 2019) menyebutkan bahwa kepadatan penduduk merupakan perbandingan masyarakat dengan daerah yang dihuninya.



Gambar 1. 2
Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020-2023)

Kemiskinan adalah contoh permasalahan yang sering terjadi pada setiap negara di dunia. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu: kemiskinan absolut dan relatif (Rosalia, 2019). Tindak kriminalitas dapat meningkat ketika batasan sosial melemah dan salah satu faktor yang menyebabkannya adalah kemiskinan (Putri & Azansyah, 2024). Seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan akan membuat angka pengangguran semakin naik. Karena tingkat pengangguran semakin tinggi, peluang seseorang mendapatkan penghasilan akan berkurang. Akibatnya, seseorang mungkin terdorong untuk melakukan tindakan kriminal agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan hal-hal yang diinginkan (Khan et al.,

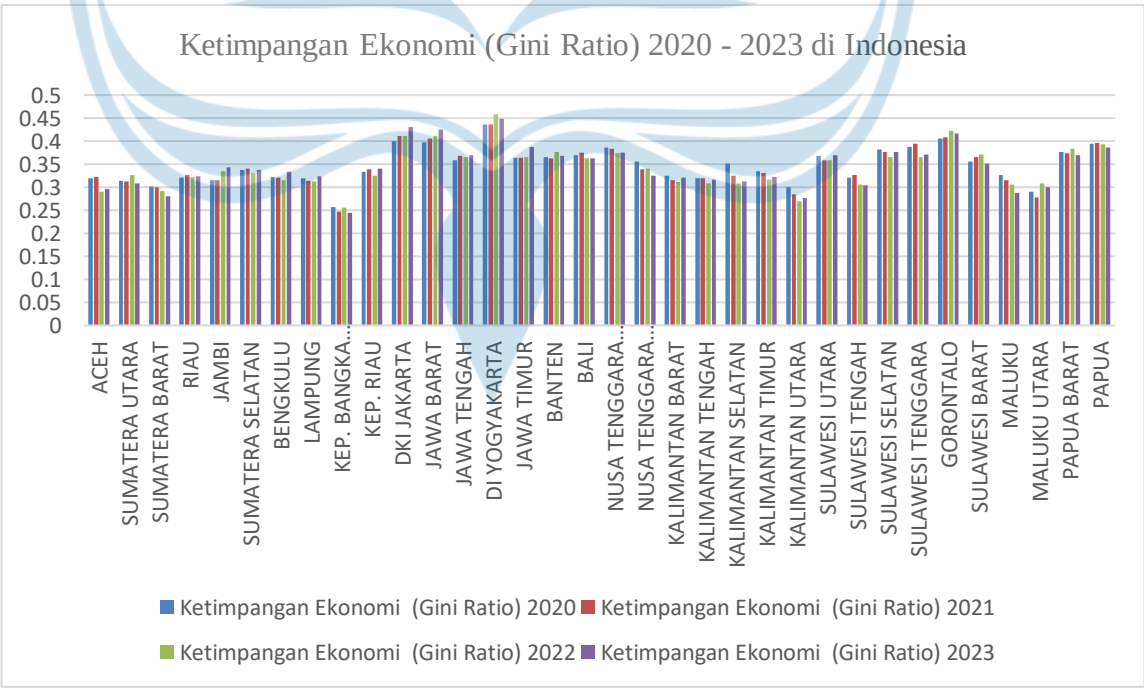
2015) Dalam faktor Sosio-ekonomis menjelaskan bahwa buruk suatu keadaan perekonomian suatu masyarakat akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup terutama kenaikan biaya yang meningkat dan sumber pendapatan yang tidak sesuai dengan meningkatnya biaya maka akan muncul orang-orang yang memiliki pemikiran dalam melakukan tindak kriminalitas (Beby, 2023).

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, masih menghadapi tantangan besar dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,9 juta jiwa atau sekitar 9,36% dari total populasi. Kemiskinan tersebar tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan angka kemiskinan yang cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Tingginya jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda prioritas dalam pembangunan nasional.

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pembuat kebijakan. Kemiskinan merujuk pada sekelompok individu ketika kelompok-kelompok tersebut tidak dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, akses pendidikan lanjutan,serta makanan yang sehat. Keterbatasan kualitas hidup ini menyebabkan rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemudian, pendapatan yang rendah membuat masyarakat miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan, dan papan (Fadhilah et al., 2023).

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau tidak meratanya pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity).

Berdasarkan analisis data tahun tentang Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio) pada tahun 2020-2023 nilai tertinggi ketimpangan ekonomi berada pada nilai 0.46, 0.42 dan 0.41 nilai tersebut berada pada tahun 2022 yaitu berada di kota D.I Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta serta menjadi angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa pada 2022 terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi yang sangat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meskipun tingkat ketimpangan masih tinggi.



Gambar 1. 3
Ketimpangan Ekonomi di Indonesia tahun 2020 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020 - 2023)

Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Adanya ketimpangan ekonomi tersebut dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kriminalitas (Bourguignon, 2001). Rasio Gini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi atau negara. Ini adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi dapat dilihat dalam berbagai aspek ekonomi, seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang adil. Kesenjangan ini menciptakan divisi sosial yang nyata antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Ketimpangan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah.

Ketimpangan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi dan kriminalitas saling mempengaruhi. Ketimpangan ekonomi terjadi ketika pendapatan dan kekayaan tidak merata dalam masyarakat, menyebabkan jarak sosial dan ekonomi yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Meskipun demikian, kriminalitas mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dapat berdampak negatif baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi sering kali menjadi salah satu penyebab tindak kriminal. Tekanan sosial dan psikologis lebih mungkin dialami oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Tekanan ini dapat menyebabkan frustrasi, iri, dan perasaan tidak adil terhadap kelompok masyarakat yang lebih baik. Akibatnya, sebagian orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara legal mungkin terdorong untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara pintas untuk mendapatkan uang. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang signifikan dapat mengurangi kohesi sosial dan kepercayaan di antara orang-orang. Ketika solidaritas dan kepercayaan sosial menurun, kontrol sosial dalam masyarakat juga menurun. Karena masyarakat menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, kondisi ini meningkatkan peluang kejahatan. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan lingkungan sosial yang tidak stabil di mana pengangguran dan kemiskinan menjadi pemicu utama tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan.

Namun, hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kriminalitas tidak selalu benar. Jadi, ketimpangan ekonomi tidak selalu menyebabkan kejahatan secara langsung. Sebaliknya, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan sosial yang adil, pemerataan pembangunan, dan penegakan hukum yang efektif, ketimpangan ini meningkatkan risiko dan peluang terjadinya kriminalitas. Negara atau daerah yang memiliki ketimpangan tinggi tetapi mampu menciptakan lapangan kerja, memberikan akses pendidikan yang setara, dan menjamin keadilan sosial biasanya dapat menekan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi di suatu daerah, semakin besar kemungkinan terjadinya kriminalitas. Oleh karena itu, cara penting untuk mengurangi ketimpangan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi. Ini akan membantu mengurangi tingkat kejahatan dan membuat kehidupan sosial lebih aman dan harmonis.



Gambar 1. 4
Migrasi Masuk di Indonesia Tahun 2020 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020 - 2023)

Pada grafik tersebut, terjadi fluktuasi atau perubahan total in-migration wilayah Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2021, migrasi masuk mencapai jumlah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yakni sebesar 36-43, yaitu pada Kota Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa pada 2023 terjadi peningkatan migrasi masuk yang sangat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi migrasi masuk meskipun tingkat migrasi masuknya masih tinggi.

Menurut BPS, migrasi secara luas diartikan sebagai perpindahan hunian tetap, nihil batasan pada jarak atau jenis perpindahan yaitu tidak ada perbedaan antara pemindahan domestik dan internasional dan apakah hal tersebut tersebut terjadi secara terpaksa atau sukarela. Sehubungan dengan konsep tempat tinggal, batas waktu migrasi adalah satu tahun. Seseorang dianggap migran jika tinggal atau berkeinginan tinggal pada lokasi baru setidaknya paling sedikit satu tahun. Adanya perubahan tempat tinggal dapat menunjukkan bahwa seseorang pernah pindah atau tidak. Diferensiasi tempat tinggal ini dijadikan sebagai proksi migrasi (Atmani & Rofi, 2021) Pola migrasi di negara yang sedang berkembang memperlihatkan migrasi ke area tertentu saja, utamanya pada kota-kota besar. Secara mendasar, fenomena ini menggambarkan bahwa kekuatan ekonomi masih berkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu serta terdapat faktor yang sangat beragam dan kompleks dalam memengaruhi keputusan penduduk untuk melakukan migrasi (Nurhalisa, 2019).

Migrasi adalah perpindahan penduduk untuk menetap di suatu tempat/kawasan yang melintasi batas administrasi kawasan tersebut (Setiadi, 1999)

Pada umumnya migrasi penduduk mengarah pada daerah-daerah yang perkembangan ekonominya "subur", karena faktor ekonomi sangat mempengaruhi pergerakan penduduk. Hal ini kembali ditegaskan oleh Giyarsih & Fauzi, 2016) yang menyatakan bahwa migrasi sebenarnya merupakan respon terhadap peluang ekonomi daerah. Perpindahan atau migrasi tersebut dilakukan dengan harapan daerah yang dituju memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Namun, pada kenyataannya lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan banyaknya penduduk di daerah tersebut. Menurut Fajri & Rizki, 2019, kepadatan penduduk banyak memunculkan persoalan dalam menata ruang dampak dari tingginya tekanan penduduk terhadap lahan. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbah utama pertumbuhan penduduk yang pesat. Ledakan penduduk yang terjadi menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Irhamni, 2017).

Menurut teori migrasi (Lee, 1966) migrasi diartikan sebagai perpindahan hunian yang menetap maupun tidak menetap tanpa terdapat pembatasan mengenai jarak perjalanan serta melintasi batas administratif mupun politik. Migrasi bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga mencakup perubahan status sosial dan tempat tinggal. Migran tidak hanya meninggalkan tempat asal mereka, tetapi juga meninggalkan identitas, jaringan sosial, dan budaya mereka (Aisyah & Atmojo, 2022).

Teori migrasi Ravenstein (1889) menjelaskan adanya tekanan (push factor) dari daerah asal dan daya tarik (pull factor) di daerah lain mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah serta dalam hal migrasi faktor penarik lebih penting

daripada unsur pendorong terjadinya migrasi (Ariyani, 2019). Sama halnya dengan Lee, 1966, Todaro (1980), dan Titus (1982) yang berpendapat bahwa dorongan utama seseorang ialah alasan ekonomi, dimana alasan tersebut berkembang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi antardaerah (Mantra, 2003).

Hubungan antara migrasi masuk dan kriminalitas merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai aspek struktural yang memengaruhinya. Pelanggaran hukum keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal atau pemalsuan dokumen, dan keterlibatan dalam kejahatan lintas batas negara (transnasional), seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia, di mana migran dapat menjadi pelaku, korban, atau keduanya, adalah kriminalitas yang paling erat kaitannya dengan migrasi masuk. Namun, kerentanan sosio-ekonomi, seperti kesulitan mencari pekerjaan stabil, kemiskinan, dan isolasi dan diskriminasi sosial di masyarakat tuan rumah, seringkali menyebabkan migran terlibat dalam kriminalitas umum. Dengan kata lain, lingkungan sosial-ekonomi yang tidak baik dan status ilegal jauh lebih mungkin mendorong aktivitas kriminal daripada status migrasi masuk itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi, Dan Migrasi Masuk Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1). Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2020-2023?

2). Bagaimana pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2020-2023?

3). Bagaimana pengaruh migrasi masuk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1). Menganalisis pengaruh dari kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2020-2023.

2). Menganalisis pengaruh dari ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2020-2023.

3). Menganalisis pengaruh dari migrasi masuk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1). Pemerintah, sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan yang objektif bagi Pemerintah di Indonesia dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi untuk menekan angka kriminalitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2). Peneliti/Pembaca, sebagai bahan referensi tentang pengaruh kemiskinan ketimpangan ekonomi, dan migrasi masuk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesi sebagai berikut:

1). Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.

2). Ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas.

3). Migrasi masuk berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas.

Ketiga hipotesis ini dirumuskan berdasarkan bukti empiris dari Hanafiah & Putri (2021), Rizki & Lestari (2022), dan Nugraha & Yuliani (2022), yang masing-masing meneliti dampak kemiskinan, ketimpangan, dan migrasi terhadap kriminalitas.

1.6 Studi Literatur

Nisa et al. (2024) dalam penelitiannya berjudul Tingkat Kemiskinan Pengaruh Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2022 menemukan bahwa tingkat kemiskinan yang rendah dan ketimpangan ekonomi yang rendah adalah kondisi ideal, yang dianggap dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan aman. Meskipun demikian, fokus utama penelitian ini adalah efek negatif yang ditimbulkan oleh komponen ekonomi. Nisa et al. (2024). menyimpulkan bahwa peningkatan ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan

yang tinggi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan tindak kriminalitas. Ini menunjukkan bahwa disparitas ekonomi yang luas dan kurangnya sumber daya dapat menjadi faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan.

Adilya & Utomo (2024), dalam penelitiannya berjudul Migrasi Masuk Risen di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2020 : Analisis Regresi Spasial dengan Generalized Methods of Moment. Menunjukkan bahwa Dinamika populasi sangat dipengaruhi oleh ukuran kesejahteraan di lokasi yang dituju. Variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan, di mana kondisi ekonomi yang kurang baik biasanya menghalangi migrasi yang masuk. Di sisi lain, variabel pendidikan (lama harapan sekolah) dan akses terhadap informasi (internet) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam menarik minat para migran. Selain itu, adanya interaksi antar wilayah (efek spasial) menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi sumber daya antara kabupaten atau kota menyebabkan konsentrasi penduduk yang tidak seimbang, yang pada gilirannya menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas sosial dan potensi kerentanannya di area tersebut.

Khairani & Ariesa (2019), dalam penelitiannya berjudul Analisis Faktor Ekonomi dan Kriminalitas di Sumatera Utara menyajikan bahwa Variabel seperti PDRB dan pendapatan per kapita daerah meningkat. Narasi Ekonomi yang Membingungkan: Menurut teori ekonomi konvensional, peningkatan indikator-indikator ini seharusnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara logis, penurunan tingkat kejahatan akan

mengikuti peningkatan kesejahteraan. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa penurunan yang signifikan dalam tingkat kriminalitas belum diikuti oleh peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita. Ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi hasil pembangunan atau faktor non-ekonomi lain yang lebih dominan dalam mendorong kejahatan, meskipun statistik makroekonomi menunjukkan perbaikan.

Purba et al. (2024), dalam penelitiannya berjudul Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Masuk Ke Kawasan Timur Indonesia menyajikan bahwa mereka menemukan bahwa migrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tujuan dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas di bidang penting (industri, perdagangan, jasa, dan konstruksi). Namun, arus migrasi yang tinggi juga menyebabkan masalah sosial dan struktural yang signifikan. Dampak utamanya adalah kepadatan penduduk yang tinggi di kota-kota besar. Peningkatan populasi melebihi kapasitas infrastruktur dan fasilitas publik. Akibatnya, kemacetan, keterbatasan perumahan, degradasi lingkungan, dan tekanan pada layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi muncul.

Mardinsyah & Sukartini (2020), dalam penelitiannya berjudul Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan dan Akses Informasi : Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dua sisi dampak ketimpangan ekonomi; di satu sisi, ketimpangan dalam skala terbatas dapat memicu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Namun di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang terlampau tinggi justru berisiko menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya memicu peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia.

Tabel 1. 1 Matrix Studi Literatur

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Nisa et al (2024), Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2022	Tingkat kemiskinan yang rendah dan ketimpangan ekonomi yang kecil dapat menekan angka kriminalitas.	Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkatkan kejahatan di Indonesia.
2.	Adilya & Utomo (2020), Migrasi Masuk Risen di Kawasan Barat Indonesia :Analisis Regresi Spasial dengan Generalized Methods of Moment	Migrasi masuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui bertambahnya tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Migrasi masuk yang tinggi dapat meningkatkan kriminalitas akibat kepadatan penduduk dan persaingan ekonomi.
3.	Khairani & Ariesa (2019), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)	Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum.	Ketimpangan ekonomi dan faktor seperti pengangguran, pendidikan rendah, serta penyalahgunaan narkoba meningkatkan kriminalitas.
4.	Purba et. al (2024), Analisis faktor faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke kawasan timur Indonesia	Menambah suplai tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas sektor industri serta perdagangan di Kawasan Timur Indonesia.	Menyebabkan kepadatan penduduk berlebih, kemacetan, keterbatasan lahan hunian, serta menurunnya kualitas lingkungan dan layanan publik.

5.	Mardinsyah & Sukartini (2020) (2020), Ketimpangan Ekonomi, kemiskinan dan akses informasi : Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia	Ketimpangan terbatas dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.	Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan meningkatkan kriminalitas.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka akan dibahas mengenai landasan teori serta temuan-temuan empiris dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsep dan teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini.

BAB III. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian yang digunakan, data beserta sumbernya, variabel-variabel yang di teliti, serta metode analisis yang di pakai dalam penelitian.

BAB IV. Hasil dan Penelitian

Dalam hasil dan pembahasan akan diuraikan dan dijelaskan penyajian data, hasil pengujian statistik, hasil analisis hipotesis, serta interpretasi dan pembahasan dari temuan penelitian yang dilakukan.

BAB V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga berisi saran yang diberikan penulisan.